

BAB V

KESIMPULAN

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan. Belanda masih ingin berkuasa di Indonesia mengingat negara RI memiliki kekayaan alam yang melimpah. Berbagai cara ditempuh oleh Belanda guna kembali berkuasa di RI baik itu dengan jalan diplomasi maupun dengan jalan militer. RI beberapa kali “digiring” oleh Belanda untuk mengadakan perjanjian, yang tentu saja sangat merugikan pihak RI.

Perjanjian pertama yang ditandatangani oleh RI dan Belanda adalah Linggarjati. Wakil dari pihak RI adalah Sutan Sjahrir sedangkan pihak Belanda adalah Prof. Schermerhorn. Dilihat dari hasil kesepatan perjanjian, pihak RI sangat dirugikan karena wilayah RI hanya terdiri dari Jawa, Sumatra, dan Madura. Wilayah selain tiga pulau tersebut akan dijadikan bagian dari Negara Indonesia Serikat atau sering disebut dengan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Perjanjian Linggarjati memang membuat wilayah RI menjadi sempit akan tetapi hal yang paling penting dari perjanjian tersebut adalah negara RI diakui secara *de facto* oleh Belanda. Dalam hal ini berarti, Pemerintah Belanda mengakui RI sebagai sebuah negara yang merdeka. Oleh para pemimpin dianggap sebagai titik penting karena dari sejak 1945, Pemerintah Belanda tidak mengakui Proklamasi Kemerdekaan RI.

Belanda merasa belum puas dengan apa yang sudah diraih ya sehingga Belanda mengajukan beberapa keputusan tentang penjagaan pos perbatasan antara daerah RI dan Belanda. Belanda menuduh RI melakukan aksi propaganda anti Belanda dan menyuruh untuk menghentikannya. Pada tanggal 21 Juli 1947 Perdana Menteri Belanda Dr. Louis Beel telah mengucapkan pidatonya yang isinya memberi kuasa penuh kepada van Mook untuk melakukan aksi Militer. Alasannya adalah pihak RI tidak menepati hasil Perjanjian Linggarjati

Aksi militer Belanda ini terkenal dengan Agresi Militer Belanda I. Untuk mengelabuhi dunia Internasional, Belanda menamakan dengan “aksi polisionil” untuk mengamankan wilayah RI dari “gerombolan pengacau”. “Gerombolan pengacau” ini adalah sebuah pemberian julukan Belanda kepada TNI. Panglima Jenderal Sudirman sebagai pemimpin tertinggi TNI menyerukan agar segera kembali berjuang untuk melawan Belanda, baik rakyat dan tentara harus saling bahu-membahu.

Agresi Militer Belanda ditujukan untuk menguasai wilayah -wilayah yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Dengan begitu, RI akan menjadi negara yang lemah secara ekonomis dan membuatnya semakin lemah. Setelah Agresi Militer selesai kemudian ditetapkan secara sepihak oleh Belanda dengan menerapkan garis Van Mook. Garis Van Mook membuat pasukan TNI yang ada di sebagian besar Pulau Jawa harus hijrah ke daerah yang tidak dikuasai Belanda. Hal tersebut membuat TNI kecewa atas sikap pemimpin pemerintahan karena mudah tunduk kepada Belanda. Akan tetapi, TNI terus melakukan gerilya kepada pasukan Belanda.

Agresi Militer Belanda I membuat Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) harus turun tangan. Amerika Serikat dan Inggris sangat tidak menyukai adanya aksi militer yang dilakukan oleh Belanda. Amerika Serikat juga mengancam akan menghentikan pemberian bantuan ekonomi pasca Perang Dunia II (PD II) kepada Belanda. Belanda akhirnya menerima keputusan PBB untuk membentuk sebuah komisi untuk menyelesaikan permasalahan RI dan Belanda. Komisi yang berdiri pada bulan Oktober 1947 diberi nama Komisi Tiga Negara (KTN).

KTN memiliki tiga negara di dalamnya yaitu Australia yang ditunjuk RI, Belgia yang ditunjuk Belanda dan diketuai Amerika Serikat yang ditunjuk Australia dan Belgia. Secara teknis KTN bekerja di bawah Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Akhirnya disepakati adanya sebuah perjanjian babak baru antara RI dan Belanda. Perjanjian yang dilaksanakan di atas kapal Amerika Serikat kemudian diberi nama perjanjian *Renville*. Perjanjian ini diawasi langsung oleh KTN dan DK PBB untuk memastikan jalan damai yang ditempuh kedua belah pihak.

Perjanjian *Renville* pada tanggal 19 Januari 1948 membuat wilayah RI semakin sempit sehingga pusat perjuangan RI berada di Yogyakarta. Pada tahun 1948 di wilayah RI tepatnya di Madiun juga terjadi pemberontakan komunis dengan tokohnya adalah Musso. TNI dikerahkan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Adanya penumpasan gerakan komunis oleh RI membuat Amerika Serikat menaruh simpati kepada RI. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat yang setelah PD II terjadi Perang Dingin dengan Uni Soviet dan berupaya saling menyebarkan pengaruhnya di dunia.

Pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi Agresi Militer Belanda II dengan sasaran adalah Yogyakarta sebagai Ibukota RI. Jalan ini bisa dikatakan merupakan jalan nekad Belanda karena pada saat itu KTN sedang berada di Kaliurang Yogyakarta. Belanda memanfaatkan masa reses di DK PBB karena akan menghadapi hari Natal. Belanda menyerang dengan menggunakan jalur udara, berbeda dengan siasat yang dijalankan pada waktu Agresi Militer I.

TNI yang sudah menyadari akan terjadinya Agresi Militer II sudah bersiap-siap di perbatasan Yogyakarta. Rencananya adalah TNI melakukan penghadangan jalur darat sesuai dengan pengalaman waktu terjadi Agresi Militer Belanda II. Sedang di Yogyakarta sendiri hanya dijaga oleh beberapa kompi TNI dan Polisi Pelajar Pertempuran (P3). Ketika terjadi Agresi Militer melalui jalur udara, Yogyakarta dengan begitu mudah dapat ditaklukan oleh Belanda.

Agresi Militer Belanda II membuat para pemimpin yang berdiam diri di Istana Negara (Gedung Agung) kemudian dijadikan tawanan dan dibuang ke luar Pulau Jawa. Sementara itu, Pasukan TNI yang berjaga di perbatasan Yogyakarta segera kembali ke Yogyakarta. Jenderal Sudirman dalam keadaan genting sempat mengeluarkan perintah kilat. Perintah Kilat itu merupakan perintah kepada seluruh TNI untuk kembali melaksanakan tugas dengan berperang melawan Belanda.

Akibat lainnya adalah membuat TNI melakukan perjalanan kembali TNI ke Yogyakarta. TNI sempat beberapa kali melakukan perlawanan dengan tentara Belanda dan menghancurkan beberapa jembatan penting yang menghubungkan

Yogyakarta dengan kota lainnya. *Wehrkreise* III (WK III) dibawah komando Letkol Soeharto segera melakukan koordinasi untuk melawan Belanda. Termasuk membagi WK III ke dalam beberapa *Sub-Wehrkreise* (SWK) agar memudahkan koordinasi.

Yogyakarta pada awalnya dibagi ke dalam enam SWK kemudian diubah menjadi tujuh SWK untuk memudahkan koordinasi pasukan. Penyerangan balasan terhadap Belanda terjadi di seluruh wilayah Yogyakarta dengan komando masing-masing Komandan SWK. Tak terkecuali, Mayor Sardjono yang mengkomandani SWK 102 dengan wilayah di Bantul. SWK 102 memiliki 4 kompi yaitu Kompi 1 pimpinan Kapten Widodo, Kompi 2 pimpinan Kapten Soedarmo, Kompi 3 pimpinan Kapten Ali Affandi, Kompi 4 pimpinan Kapten Soemarmo.

Bantul merupakan salah satu wilayah yang ada di Yogyakarta yang banyak didirikan Pabrik Gula peninggalan Belanda. Belanda berkeinginan merebut kembali pabrik gula tersebut sehingga pada tanggal 29 Desember 1948 datang ke Bantul melalui arah Barat. Dari arah Barat Belanda menyusuri pegunungan kemudian turun di desa Pandak dan merebut Pabrik Gula di Gesikan. Mengetahui gerakan Belanda ke arah Bantul, beberapa pasukan TNI kemudian melakukan bumi hangus terhadap Pabrik Gula tersebut diantaranya adalah di Pleret dan Padokan. Perintah bumi hangus ini sesuai dengan rencana sebelum terjadi Agresi Militer Belanda I.

Taktik yang dijalankan TNI adalah dengan taktik gerilya mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern dibandingkan dengan senjata TNI. TNI tidak akan menang jika bertempur secara *frontal* dan terus menerus. Taktik gerilya juga dipilih karena rakyat RI selalu membantu dan berpihak kepada TNI. Pemerintahan Militer yang dibentuk berhasil mengkoordinasi rakyat dari tingkat atas hingga tingkat pedukuhan.

Kepercayaan rakyat sangat penting untuk dipertahankan dan ditingkatkan, oleh karena berkaitan dengan masalah logistik sehingga TNI perlu mengadakan serangan balasan ke kota Yogyakarta. Serangan yang dilakukan antara lain tanggal 29 Desember 1948 dan 9 Januari 1949. Selain itu TNI khususnya SWK 102 juga aktif bertempur di wilayahnya. Batalyon SWK 102 terkenal memiliki pasukan yang tangguh dan cerdik dalam bertempur, sehingga tentara Belanda agak khawatir akan hal itu.

Beberapa markas Belanda seperti di bekas Pabrik Gula Pleret, Barongan, Padokan tidak luput dari sasaran serangan SWK 102. Markas komando yang ada di Kota Bantul juga selalu digempur dengan granat maupun senjata api. SWK 102 sendiri terbagi ke dalam empat kompi yaitu Kompi I pimpinan Kapten Wido do, Kompi II pimpinan Lettu Soedarmo, Kompi III pimpinan Lettu Ali Affandi, dan Kompi IV pimpinan Lettu Soemarmo. Masing-masing kompi memiliki fungsi dan tugas sendiri-sendiri.

Kompi yang selalu mobil/bergerak adalah kompi Kapten Widodo dan Kompi yang terkenal ketangguhannya adalah Kompi Ali Affandi. Di dalam

Kompi Ali Affandi ada Komandan Peleton Komaruddin yang terkenal anti peluru. Pasukan SWK 102 selalu bertugas di pos perbatasan antara kota Yogyakarta dan Bantul. Oleh sebab itu, perlawanan banyak terjadi di daerah seperti Sewon, Kasihan, dan Pleret. Beberapa pertempuran yang terjadi adalah Pertempuran Jati dan Brajan, Pertempuran Mrisi, Pertempuran Sangkal, Pertempuran Pelem Sewu, dan Pertempuran Ngoto.

Tidak semua pertempuran dapat dimenangkan oleh pihak TNI akan tetapi beberapa pertempuran pihak TNI juga mendapat korban jiwa yang tidak sedikit. Belanda-pun sebaliknya beberapa pertempuran juga menderita korban jiwa dan korban peralatan perang yang tidak sedikit pula. Bisa dikatakan, pertempuran yang dilakukan oleh SWK 102 sangat seru dan berlangsung terus menerus. Dari beberapa pertempuran itulah pihak TNI khususnya SWK 102 berhasil mendapat senjata untuk melengkapi perlengkapan dan amunisi.

Serangan balasan yang dilakukan tampaknya masih kurang memberikan kepercayaan kepada rakyat. Belanda di kancah dunia Internasional terus menerus bersikukuh bahwa aksi-aksi militernya adalah untuk mengamankan dari “gerombolan pengacau”. TNI dianggap sebagai gerombolan pembuat rusuh keamanan dan perlu dibasmi. RI dituduh melakukan propaganda anti Belanda sehingga membuat RI agak terdesak di forum PBB. Permasalahan RI dan Belanda akan kembali dibahas pada sidang PBB permulaan bulan Maret 1949.

Sri Sultan HB IX yang mengetahui hal tersebut segera mengambil inisiatif untuk melakukan serangan umum tetapi pada siang hari. Sri Sultan HB IX

kemudian mengirimkan surat kepada Jenderal Sudirman akan adanya rencana tersebut. Setelah disetujui kemudian Sri Sultan HB IX diperintahkan untuk langsung berkoordinasi dengan Letkol Soeharto selaku Komandan WK III. Letkol Soeharto kemudian diminta menghadap Sri Sultan HB IX pada tanggal 13 Februari 1949.

Pertemuan yang berlangsung di dalam keraton tersebut tersamarkan oleh Belanda mengingat Soeharto memakai pakaian adat Jawa. Dalam pertemuan tersebut Soeharto menyanggupi tanggung jawab besar sebagai komandan Serangan Umum 1 Maret 1949. Setelah keluar dari lingkungan keraton dan kembali ke markasnya di Bangunjiwo Kasihan, Soeharto kemudian melakukan koordinasi dan perencanaan yang matang agar Serangan Umum tersebut berhasil.

Serangan Umum 1 Maret 1949 perlu dilakukan karena mengingat kepercayaan yang semakin berkurang akibat perang yang berkepanjangan. Hal tersebut dipahami betul oleh Sri Sultan HB IX selaku raja dari Yogyakarta. Dengan adanya Serangan Umum yang dilakukan pada siang hari, rakyat dapat mengetahui bahwa TNI bisa melakukan taktik menyerang (*Offensive*) bukan bertahan (*defensive*). Selain itu, untuk memberikan dukungan kepada pidato Palar yang merupakan wakil RI di forum DK PBB.

Pembagian ke tujuh SWK sudah direncanakan begitu juga dengan sasaran dari objek penyerangan tersebut. SWK 102 mendapat tugas untuk menyerang di Kantor Pos dan Benteng, Pabrik Aniem Wirobrajan, Markas Belanda di Kotagede, Wirogunan, Pojok Benteng *Wetan*, Pabrik Watson, dan Lempuyangan. Selain itu

SWK 102 mendapat tugas untuk membuat Belanda yang berada di markas Bantul agar berdiam diri. Hal tersebut dilakukan agar Belanda tidak saling mengirimkan bantuan ke dalam ataupun keluar Kota Yogyakarta.

Gerakan pasukan SWK 102 dimulai pada malam hari tanggal 28 Februari 1949 dengan pusat komando di dalam Keraton Yogyakarta. Setelah bunyi sirene pergantian jam malam pada pukul 06.00 pagi tanggal 1 Maret 1949 berbunyi, semua pasukan dari beberapa penjuru melakukan serangan kepada markas dan pos-pos Belanda. Belanda yang dalam posisi tidak siap hanya melawan sebisanya dan mengirimkan radio meminta bantuan dari luar Yogyakarta.

Sementara itu beberapa kompi SWK 102 yaitu Kompi Soedarmo, Kompi Ali Affandi, Kompi Widodo, dan kompi bantuan pimpinan Darsono memulai gerakan penyerangan pada sasaran masing-masing. Kompi Widodo yang merupakan kompi mobil/selalu bergerak melanjutkan serangan dari Pabrik Watson menuju Kotabaru. Di Pabrik Watson Kompi Widodo mendapatkan amunisi sebanyak lima ton dan beberapa persenjataan lainnya.

Sekitar tengah hari SWK 102 berhasil menaikkan Bendera Merah Putih di Ringin Kurung Alun-alun Utara. Hal tersebut merupakan bukti bahwa TNI telah memenangkan penyerangan dan Belanda telah berhasil dikalahkan. Akan tetapi pada pukul 12.00 bantuan Belanda dari luar Yogyakarta datang dengan pasukan terkuat yaitu Anjing NICA dan Gajah Merah. TNI yang mengetahui hal tersebut segera mengundurkan diri ke luar kota Yogyakarta agar korban tidak berjatuhan lebih banyak lagi.

Pasukan SWK 102 pun ikut mengundurkan diri dengan pusatnya di daerah Krapyak, Beji, dan Pandak. Ketiga tempat tersebut sudah ditentukan sebelumnya sehingga pasukan SWK 102 dapat mundur dengan teratur tanpa ada yang terpisah kecuali Kompi Widodo. Kompi Widodo yang terpisah dari induk pasukan mengundurkan diri dari Kotabaru menuju daerah Mangkuyudan. Walaupun begitu Kompi Widodo sempat melakukan perlawanan di beberapa tempat untuk menghalau tentara Belanda.

Korban dari pihak RI akibat Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah TNI kehilangan 353 orang gugur, diantaranya 53 orang pasukan polisi. Korban dari kalangan rakyat tidak dapat dihitung dengan pasti. Sedangkan korban di pihak Belanda juga tidak diketahui secara pasti, namun menurut *De Wapen Broeder* (sebuah majalah Belanda) terbitan Maret 1949, korban di pihak Belanda selama bulan Maret 1949 sebanyak 200 orang (tewas dan luka-luka). Sekitar 150 orang diantaranya akibat Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut.

Adanya Serangan Umum tersebut disaksikan sendiri oleh KTN yang sedang berada di Kaliurang. Hal tersebut membuat KTN sadar bahwa TNI masih ada dan sebenarnya Belanda-lah yang membuat kerusuhan. Dampak lain dari adanya Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah kepercayaan dan semangat Rakyat kembali meningkat karena TNI ternyata bisa melakukan serangan secara *Offensive* bukan *defensive*, TNI semakin percaya diri karena berhasil mengalahkan tentara Belanda pada waktu siang hari. Kemudian PBB melalui KTN mengetahui bahwa RI dan TNI masih ada karena masih bisa memberikan perlawanan kepada Belanda.

Setelah itu secara berangsur-angsur keadaan di RI semakin membaik. Persetujuan Roem Roijen dilaksanakan untuk menyerahkan pengembalian Yogyakarta dari tangan Belanda. Akhirnya Belanda akhirnya menyetujui untuk melaksanakan perjanjian penyerahan kedaulatan bagi RI. Pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai bukti bahwa Belanda menepati janjinya untuk menyelesaikan permasalahan dengan RI dengan jalan damai. Pada tanggal 27 Desember 1949 Pemerintah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas RI akan tetapi tidak termasuk Pulau Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Atim Supomo, dkk. (1996). *Brimob Polri Jateng dan DIY dalam Lintasan Sejarah*. Semarang: Brigade Mobil Polda Jateng.
- A.Eryono. (1982). *Reuni Keluarga Bekas Resimen 22-WK.III. Pada Tanggal 1 Maret 1980 di Yogyakarta*. Jawa Tengah: Keris-22-WK.III.
- A.H. Nasution. (1966). *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata*. Jakarta: Megabookstore
- . (1976). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- . (1984). *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa yang lalu dan yang Akan Datang*. Bandung: Angkasa.
- . (1989). *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 2A: Kenangan Masa Gerilya*. Jakarta: Haji Masagung..
- Amrin Imran, dkk. (1971). *Sedjarah Perkembangan Angkatan-Darat*. Jakarta: Pusat Sedjarah ABRI.
- Bagus Dharmawan. (2008). *Warisan daripada Soeharto*. Jakarta: Kompas.
- Bambang Purwanto, dkk. (2008). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Boediardjo. (1996). *Siapa Sudi Saya Dongengi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dharmono Hardjowidjono. (1984/1985). *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta Jilid II*. Yogyakarta: Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa di Daerah Yogyakarta.
- Djumarwan. (2010). *Laskar Putri Indonesia*. Yogyakarta: Lembah Manah.
- Dudung Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Helius Sjamsuddin. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Himawan Soetanto. (2006). *Yogyakarta, Jenderal Spoor vs Jenderal Sudirman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Ide Anak Agung Gde Agung. (1983). *‘Renville’ – als keerpunt in de Nedelands-Indonesische onderhandelingen*, a.b. Hanny Rungkat, dkk, *Renville*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Irna H.N. Hadi Soewito, dkk. (2008). *Awal Kedirgantaraan di Indonesia, Perjuangan AURI 1945-1950*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Gerilya Wehrkreise III*. Yogyakarta: Percetakan Keluarga, tt.
- Giebels, Lambert. (2001). *Soekarno, Nederlandsch Onderdaan, Een Biografie 1901-1950*, a.b. I. Kapitan-Oen B.A., *Soekarno, Biografi 1901-1950*. Jakarta: Gramedia.
- Gottschalk, Louis. (2006). *Understanding History*, a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Mestika Zed. (1997). *Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Mohamad Roem, dkk. (1982). *Tahta Untuk Rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sultan HB IX*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho Notosusanto. (1992). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Oemar Sanusi, dkk. (1981). *Api Segoroyoso*. Yogyakarta: Proyek Pemeliharaan Tempat-Tempat Bersejarah dan Perjuangan Bangsa.
- . (1983). *Replika Sejarah Rakyat Yogyakarta, Jilid 1*. Yogyakarta: Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa di Daerah Yogyakarta.
- P.J. Suwarno. (1994). *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1924-1974, Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ricklefs, M.C. (2009). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Sardiman AM. (2000). *Panglima Jenderal Sudirman Kader Muhammadiyah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- . (2004). *Memahami Sejarah*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Sartono Kartodirdjo. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sayidiman Suryohadiprojo. (1981). *Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang, Masalah Ketahanan Negara*. Jakarta: Intermasa.
- Sekretariat Negara RI. (1985). *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- SESKOAD. (1993). *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta Latar Belakang dan Pengaruhnya*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Sewan Susanto. (1985). *Perjuangan Tentara Pelajar dalam Perang Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto S.A. (1981). *Perjalanan Bersahaja Jenderal Sudirman*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Soetardono, dkk. (1997). *Buku Sewindu Monumen Yogyakarta Kembali 1989-1997*. Yogyakarta: Yayasan Monumen Yogyakarta Kembali.
- Suhartono W. Pranoto. (2010). *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukardi Sosro Hadi Handoyo. (1976). *30 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- Sujamto. (1988). *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sutrisno Kutoyo. (1996). *Sri Sultan Hamengku Buwono IX Riwayat Hidup dan Perjuangan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Tataq Chidmad, dkk. (2001). *Pelurusan Serangan Oemoem 1 Maret 1949*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Tashadi, dkk. (1992). *Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di DIY Periode 1945-1949*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Tjokropranolo. (1992). *Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman, Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia*. Jakarta: Surya Persindo.
- T.B. Simatupang. (1980). *Laporan dari Banaran*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tim Lembaga Analisis Informasi. (2008). *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Untung Rahardjo, dkk. (2008). *Ketika Rakyat Bantul Membela Republik*. Yogyakarta: Yayasan Projotamansari.

Yahya A. Muhamin. (1982). *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jurnal:

Darto Harnoko. (2004). “Peranan Sub Wehrkreise 103-A Pada Masa Perang Kemerdekaan Kedua di Sleman Barat: Suatu Kajian Sejarah Lisan”, *Patra Widya*, Vol. 5 No. 2, Juni 2004, hlm. 1-47.

Dwi Ratna Nurhajarini. (2003). “Peranan Sub Wehrkreise 104 Pada Masa Perang Kemerdekaan II di Daerah Istimewa Yogyakarta: Suatu Kajian Sejarah Lisan”, *Patra Widya*, Vol. 4 No. 4, Desember 2003, hlm. 73-103.

Hisbaron Muryantoro. (2003). “Peranan Sub Wehrkreise 106 Pada Masa Perang Kemerdekaan II di Kabupaten Kulon Progo Suatu Kajian Sejarah Lisan”, *Patra Widya*, Vol. 4 No. 3, September 2003, hlm. 1-35.

Sri Retna Astuti. (2002). “Peranan Sub Wehrkreise 105 Pada Masa Perang Kemerdekaan Kedua di DIY: Suatu Kajian Sejarah Lisan”, *Patra Widya*, Vol. 3 No. 3, September 2002, hlm. 1-31.

Suhatno. (2001). “Peranan Sub Wehrkreise 102 Pada Perang Kemerdekaan Ke II di Kabupaten Bantul Suatu Kajian Sejarah Lisan”, *Patra Widya*, Vol. 2 No. 4, Desember 2001, hlm. 27-82.

----- (2005). “Peranan Rakyat Tirtonirmolo Kabupaten Bantul Pada Masa Perang Kemerdekaan II Tahun 1948-1949”, *Patra Widya*, Vol. 6 No. 3, September 2005, hlm.

Koran:

Kedaulatan Rakyat, Rabu, 8 Desember 1949, Tahun IV No. 59, hlm. 1.

Kedaulatan Rakyat, Senin, 13 Desember 1948, Tahun IV No. 63, hlm. 1.

Kedaulatan Rakyat, Rabu, 15 Desember 1949, Tahun IV No. 65, hlm. 1

Skripsi :

- Pungki Sofia. (2005). *Kontribusi Masyarakat Desa Segoroyoso Kabupaten Bantul Provinsi DIY Untuk Mendukung Markas Komando Wehrkreise III Pada Masa Perang Kemerdekaan II (1948-1949)*. Yogyakarta: FISE Universitas Negeri Yogyakarta.
- Siti Surifah. (2004). *Sejarah Perjuangan SWK 103 Pada Masa Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta*. Yogyakarta: FISE Universitas Negeri Yogyakarta.